

**RELEVANSI KETENTUAN CASH WAKAF UNDANG-
UNDANG WAKAF NO. 41 TAHUN 2004 DAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 2006
TERHADAP KONSEP *AL-ISTIQRĀ' AL-MA'NĀWĪ*
ASY-SYĀTIBĪ**

SKRIPSI

Oleh :

Hasanuddin
NIM : CO1304042



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2009 029 AS	No REG : S-2009/AS/029 ASAL BUKU : TANGGAL :

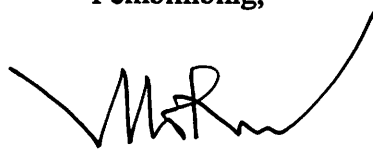
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSHIYAH
SURABAYA
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang ditulis oleh Hasanuddin ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya,

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Masruhan', written in a cursive style.

Drs. Masruhan, M.Ag
Nip. 150235849

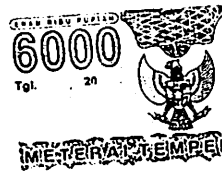
SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama : Hasanuddin
Nim : CO 1304042
Semester : X
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Sungai Rujing III Sangkapura Bawean Gresik

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul "Relevansi Ketentuan Cash Wakaf Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 Dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Terhadap Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi Asy-Syatibi" Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya 13Februari 2009
Pembuat pernyataan





Hasanuddin
Nim: CO 1304042

PENGESAHAN

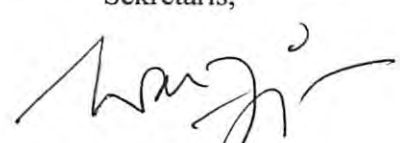
Skripsi yang ditulis oleh Hasanuddin NIM: CO1304042 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari selasa, Tanggal 24 Februari 2009 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi


Ketua,


Drs. Mardjudi, SH
NIP. 150 183 350

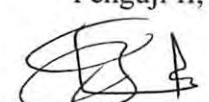
Sekretaris,


Sri Warjiyati, SH, MH
NIP. 150 368 414

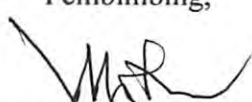
Penguji I,


Dr. H.A. Faishol Haq, M.Ag
NIP. 150 207 785

Penguji II,


H. Mthammad Arif, MA
NIP. 150 321 632

Pembimbing,


Drs. Masruhan, M.Ag
NIP. 150 235849

Surabaya, Maret 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. H.A. Faishol Haq, M.Ag
NIP. 150 207 785

- 4) Achmad djunaidi, *Proses lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf*,
- 5) Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam Di Indonesia*,
- 6) Direkterorat Jenderal, *Pemberdayaan wakaf*
- 7) Anshori, AG., *Hukum dan Praktifk Perwakafan di Indonesia*.
- 8) Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*.
- 9) Qahaf, M, *Manajemen Wakaf Produktif*.
- 10) Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Uşul al-Fiqh*
- 11) M. Arkoun, *Membedah Pemikiran Islam*.
- 12) Achmad Djunaidi *Strategi pengembangan wakaf tunai di indonesia*
- 13) Saifuddin al-Amidi, *al-Ihkām fi Uşūl al-Ahkām*, jilid 3, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah,
- 14) Nasiruddīn, 'Abdurrahmān al-Anşārī al-Masyhūr bi Ibn al-Hanbali, *Kitāb Aqyisah an-Nabī al-Muştafā Muhammad saw.*, (Mesir: al-Kutub al-Hadīśah, 1973).
- 15) Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Gazali, *Maqāsīd al-Falāsīfah*.
- 16) M. Quraysh Shihab, *Membumikan Al-Quran*.
- 17) Didin Hafidhuddin, *Wakaf Uang Dalam Pandangan Syariat Islam*.
- 18) Fathurrahman djamil, *filsafat Hukum Islam*.

3. Teknik pengumpulan data.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, digunakan teknik yang sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu dengan menggunakan teknik studi dokumen, yakni; peneliti akan mencari data mengenai variabel yang berupa kitab atau buku-buku serta pengumpulan data dengan cara menghimpun data, yang berasal dari buku-buku atau kitab, dan sumber data yang lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Analisis Data.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yaitu penelitian terhadap Relevansi ketentuan *Cash* wakaf Undang-Undang wakaf No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dengan konsep *Al-Istiqrā' Al-Ma'nawī* Asy-Syāṭibi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu memaparkan data tentang ketentuan-ketentuan *Cash* wakaf dan konsep *Al-Istiqrā' Al-Ma'nawī* Asy-Syāṭibi yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan cara ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan di analisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan logika induktif.

Logika induktif adalah analisis pada data-data yang bersifat khusus yaitu pada pasal-pasal tentang *Cash* wakaf dan konsep *Al-Istiqrā' Al-*

Istibat Hukum Sebelum Asy-Syāṭibi, dan Menurut Asy-Syāṭibi, dan Tipologi Konsep *Al-Istiqrā' Al-Ma'nawī* Asy-Syāṭibi).

Bab Empat : Dalam bab ini dikemukakan analisa penulis tentang Relevansi Ketentuan *Cash* wakaf uang dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 terhadap konsep *Al-Istiqrā' Al-Ma'nawī* Asy-Syāṭibi.

Bab Kelima : Bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis sesuai dengan permasalahan yang ada kepada pihak-pihak yang terkait.

peradilan. Berbeda dari putusan muftī yang disebut fatwa, putusan hakim (*qāḍī*) pengadilan disebut dengan hukum. Dalam prakteknya, seorang hakim (*qāḍī*) pengadilan biasanya dibantu oleh *musyāwirūn* yang berasal dari kalangan ahli hukum Islam (*fuqahā*); (3) pada tingkat notaris (*wusṣaq*). Fiqh Maliki diterapkan untuk mencatat dan mengesahkan berbagai kontrak serta mendokumentasi berbagai persoalan hukum. Notaris ini, biasanya adalah ahli hukum Islam yang menjadi anggota dewan *musyāwirūn* di pengadilan atau seorang muftī. *Ketiga*, orang-orang yang berperkara di pengadilan, pada umumnya, telah terlebih dahulu meminta fatwa dari muftī tentang hukum masalah yang dihadapinya. Dalam proses peradilan, mereka mengemukakan fatwa-fatwa yang telah diterimanya dari muftī. Seorang hakim (*qāḍī*) baru mengambil keputusan hukum setelah berkonsultasi dengan orang-orang yang terkemuka, yakni para *musyāwirūn* di pengadilan. Keputusan hukum yang diambil oleh *qāḍī* mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan final. Artinya, keputusan itu tidak dapat diubah atau diganti, sekalipun para saksi merubah kesaksian atau ada bukti-bukti baru. Kendatipun demikian, dalam masalah-masalah tertentu, permohonan pembatalan keputusan hakim pengadilan dapat diajukan kepada Sultan sebagai permintaan *grasi*. *Keempat*, problem *yurisdiksi*, Sebagaimana fiqh dalam aliran-aliran hukum lain, dalam fiqh *maḥab* Malikipun mencakup semua masalah yang berkaitan dengan agama, etika, keluarga dan lain sebagainya, dan seorang muftī dapat dimintai

makhluk budaya. Sebab itu, diskusi tentang hubungan *naṣ-naṣ* dengan tradisi tersebut menjadi penting.

d. Hubungan Naṣ dengan Tradisi

Dalam bahasa Arab tradisi disebut *‘ādah* atau *‘urf*, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *custom practice, legal practice*.²⁴ Kata *al-‘urf*, juga dapat berarti *al-ma‘rifah* yang mengandung arti pengenalan secara baik terhadap sesuatu dan diterima oleh akal sehat. Pengertian ini sejalan dengan makna *al-‘urf* dalam firman Allah: Q.S. 7, al-A‘raf 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

*“Jadilah engkau pema‘af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma‘rūf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”*²⁵

Dan makna *al-ma‘rūf* lawan kata *al-munkar*, seperti penafsiran Ridha,²⁶ terhadap firman Allah: (Q.S.7, al-A‘raf.157)

...يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ... (١٥٧)

*“...yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma‘rūf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar...”*²⁷

Kendatipun melegitimasi keberadaan tradisi dengan ayat di atas tidak diterima secara universal,²⁸ namun esensi tradisi yang baik tampaknya dapat ditolerir oleh makna ayat.

²⁴ www.hanswehr.com, akses tanggal 25/2008

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahannya*, h. 179

²⁶ Muhammad Rasyid Ridā, *Tafsīr al-Manār*, Jilid 9, (Beirut: Dar al-Fikr, 1367 H), h. 227.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahannya*, h. 170

²⁸ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Mu‘assasah ar-Risālah, 1998), h.

- b. Kelompok yang mengakui bahwa tujuan *asy-Syar'i* bukan terletak pada *zahir-zahir naṣ* dan juga bukan terletak pada pemahaman petunjuk kebahasaan. Bagi mereka, tujuan-tujuan *asy-Syāri'* itu, hanya dapat diketahui melalui *al-imam al-ma'sum* dan memegang apa saja yang disampaikannya. Kelompok yang cenderung menafikan *Syari'ah zahir* ini, menurut asy-Syāṭibi, adalah kelompok *Baṭiniyah*, tepatnya adalah kaum *Syi'ah*.
- c. Kelompok yang berpendapat bahwa tujuan-tujuan *asy-Syāri'* itu dapat dipahami melalui makna-makna lafaz melalui nalar, dan tidak berpegang kepada *zahir-zahir naṣ* secara *mutlak*. Jika *naṣ-naṣ* itu menyalahi pengertian yang ditemukan melalui nalar, maka pengertian itu haruslah ditinggalkan atau didahulukan makna *nazari* tersebut, baik dengan alasan kewajiban memelihara kemaslaatan secara mutlak maupun dengan alasan tidak ada kewajiban mengikuti makna *zahir*. Sejauh itu, para pemikir haruslah berusaha secara sungguh-sungguh menemukan makna *naṣ-naṣ*, sehingga lafaz-lafaz *syar'iyah* tersebut dapat mengikuti makna-makna *nazariyah*. Kelompok ini disebut sebagai orang-orang yang berpegang teguh dengan *al-qiyās*.
- d. Kelompok yang mengakui pengertian-pengertian *lafziyah* dan *ma'nawiyah* dalam mengungkap tujuan-tujuan *asy-Syāri'*. Mereka tidak mengabaikan aspek *lafziyah* dan sebaliknya tidak mengabaikan aspek

- d. Dalam hal ini asy-Syāṭibī membedakan nilai-nilai tersebut kepada nilai antara (*waṣīlah*) dan nilai *mutlak* atau nilai tujuan (*gāyah*). Nilai antara atau alat adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara keturunan dan memelihara akal, yang dalam perumusan hukum untuk memelihara hal-hal tersebut dengan mempedomani nilai-nilai lain seperti yang telah diuraikan. Nilai-nilai antara ini dimaksudkan adalah untuk mencapai nilai hakiki atau nilai mutlak, yaitu kemaslahatan didunia dan akhirat. Termasuk usaha identifikasi ini adalah mencermati *amar* dan *nahi*. Hal ini penting karena untuk dapat mengambil kesimpulan hukum yang tepat dan mencerminkan kemaslahatan, mengingat *amar* dan *nahi* tersebut ada yang sifatnya langsung menyentuh persoalan hukum tertentu dan ada yang tidak. Selanjutnya mencermati bahwa hukum-hukum *syara'*, baik *'ādiyah (muamalah)* maupun *'ibādiyyah* mempunyai tujuan-tujuan asal (*al-maqāṣid al-aṣliyah*) dan mempunyai tujuan-tujuan pengikut (*maqāṣid tab'iyyah*). Hukum-hukum *'ādiyah* umpamanya nikah di-Syarī'ah untuk melanjutkan keturunan sebagai (berdasarkan) tujuan pertama (*al-qasd al-awwal*). Lalu diiringi dengan tujuan mencari ketenteraman, berpasangan, saling Bantu-membantu dalam masalah *duniawiyah* dan *ukhrāwiyah*, berupa hubungan seksual dengan cara yang halal, memandang keindahan perempuan yang diciptakan Tuhan, menghiasi perempuan atau memelihara kehidupannya, anak-anaknya,

Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau kemampuan nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan diatas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk undang-undang tentang wakaf. Pada dasarnya mengenai perwakafan berdasarkan syari'ah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2004 tentang wakaf. Namun terdapat pula berbagai pokok pengauran yang baru antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, undang-undang ini menjelaskan bahwa perbuatan hukum wakaf dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengetaur mengenai wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan dengan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf

